

Polisi akan Periksa CCTV TKP Wanita Diduga Dianiaya Anggota DPRD Takalar

JAKARTA (IM) - Seorang wanita berinisial AG mengaku dianiaya kekasihnya yang merupakan diduga anggota DPRD Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Polisi bakal memeriksa CCTV apartemen, yang merupakan lokasi penganiayaan.

"Saksi yang lain yang akan kita periksa dan analisis CCTV," kata Kapolsek Tebet Kompol Jamaludin Nababan saat dihubungi, Selasa (5/9).

Jamaludin mengatakan hingga saat ini korban AG belum bisa diminta keterangan terkait perkara yang ada. Pihak kepolisian, lanjut Jamaludin, juga akan memastikan identitas terlapor yang disebut-sebut sebagai anggota DPRD Takalar.

"Belum mau memberi keterangan. Untuk terlapor kita pastikan dulu identitas dan kebenaran pekerjaannya," ujarnya.

Dari keterangan sementara, korban mengaku dianiaya terduga pelaku di apartemen miliknya di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, karena masalah uang. Meski demikian, pihak kepolisian masih harus mendalami pengakuan korban.

"Pengakuan dia, itu

orang (pelaku) anggota DPRD. Pengakuan dia (korban) sementara ya seperti itu, sama juga yang seperti disampaikan ke kami. Bahwa itu anggota DPRD, masalah ini masalah uang, segala macam," ujarnya.

Aksi penganiayaan terhadap korban viral di media sosial (medsos). Dalam postingan viral tersebut, disebutkan pelaku yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Jakarta berkunjung ke apartemen korban di wilayah Tebet.

Saat itu terjadi cekcok antara pelaku dan korban. Diinfokan, percekocokan terjadi lantaran pelaku tak terima ditagih utang oleh korban.

Aksi penganiayaan terhadap korban pun terjadi di apartemen tersebut. Atas kasus itu, korban membuat laporan polisi ke Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Laporan tersebut sudah teregister dengan nomor LP/B/629/IX/2023/SPT/POLSEK TEBET/POLRES METRO JAKARTA SELATAN/POLDA METRO JAYA.

Dalam postingan tersebut, ditunjukkan beberapa gambar luka yang dialami korban. • lus

Polisi akan Mediasi Warga yang Bentrok Lantaran Sengketa Tanah di Penjaringan

JAKARTA (IM) - Bentrokan antarwarga terjadi di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara (Jakarta). Akibat kejadian tersebut, empat orang menghalmi luka-luka. Pihak kepolisian akan mediasi kedua kelompok yang terlibat bentrokan.

"Kita melakukan mediasi. Akan kita lakukan mediasi dengan melibatkan stakeholder yang ada," kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setyawan, kepada wartawan, Selasa (5/9).

Gidion menyebut mediasi diharapkan bisa menyelesaikan masalah sengketa tanah yang ada. Dia juga berharap masalah tersebut tidak berimbas pada aksi serupa ke depannya.

"Mudah-mudahan mendapatkan langkah-langkah dan titik temu yang baik untuk semua pihak," ujarnya.

Kombes Gidion menjelaskan, bentrokan tersebut dipicu masalah

sengketa tanah. Polisi juga masih mendalami laporan polisi terkait dugaan pendudukan lahan yang telah dilaporkan.

"Ini memang berawal dari sengketa, dugaan kami berawal dari sengketa tanah, tapi coba kita sampaikan juga bahwa kita juga sedang melakukan penyidikan terhadap satu laporan polisi yang dilaporkan oleh tiga orang atas Pasal 167 atau menduduki lahan," jelasnya.

Bentrokan antarwarga tersebut juga viral di media sosial (medsos). Dari video yang beredar, tampak kedua kubu memenuhi ruas jalanan di lokasi dan saling serang satu sama lain.

Beberapa di antara mereka mempersenjatai diri dengan balok kayu panjang. Balok tersebut lantas dipukulkan ke pihak lawan. Terdengar teriakan warga lain di lokasi yang melihat langsung peristiwa tersebut. • lus

Istri Polisi Tiktoker di Probolinggo Ngamuk di Swalayan Akhirnya Minta Maaf

PROBOLINGGO (IM) - Seorang seleb Tik Tok asal Kabupaten Probolinggo marah-marah saat sedang berbelanja di salah satu swalayan di Probolinggo. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat selebgram tersebut marah karena tak puas dengan layanan siswi yang magang di swalayan salah satu Kota Probolinggo.

Seleb Tik Tok @luluk, nuril tersebut diketahui bernama Luluk Sofiatul Jannah. Aksinya yang memarahi siswi magang di swalayan viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, Luluk mengaku kecewa dan marah dengan layanan yang dilajukan pegawai magang di swalayan.

Saat itu Luluk merasa diremehkan oleh pegawai magang setelah mengambil pakaian anak kecil dengan jumlah banyak.

"Aku loh ini pesan (sambil menunjukkan barang belanjanya), tidak mungkin saya batalin, kamu pikir saya tidak bisa membayar belanjaan segini. Puluhan juta akan saya bayar, apalagi hanya segini," kata Luluk dengan nada tinggi dalam video unggahannya.

Tak hanya itu, dalam video postingan lainnya, Luluk juga menyebut siswi pegawai magang tersebut dengan kata babu. Belakangan diketahui siswi pegawai magang di swalayan tersebut berasal dari SMKN 1 Kota

Probolinggo. Wakapolres Probolinggo Kompol Nur Halim saat dikonfirmasi membenarkan insiden dalam video tersebut. Nur Halim menyebutkan Luluk merupakan istri anggota polisi yang bertugas di Polres Probolinggo.

Usai insiden tersebut, Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana kemudian memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak untuk diminta klarifikasi dan dimediasi.

"Benar, dia (Luluk Nuril) adalah istri dari anggota kami yang bertugas di wilayah hukum Polres. Sudah kami panggil, dan kami pertemuan dengan guru, siswa yang magang di pusat perbelanjaan di Kota Probolinggo itu dan sepakat si Luluk ini menghapus videonya dan membuat video permintaan maaf," kata Halim kepada wartawan, Senin (3/9).

Sedangkan motif Luluk merekam aksinya karena kecewa dengan layanan pegawai magang tersebut. Halim menyebut Luluk dan suaminya pun telah meminta maaf atas aksinya yang membuat gaduh media sosial.

"Alasan yang bersangkutan hingga membuat video tersebut kepada kami karena saat itu sedang emosi. Dari pemanggilan ini, istri anggota kami ini bersedia meminta maaf baik kepada korban dan juga pihak swalayan," tandas Halim. • lus

12 | PoliceLine

FOTO: IM/FRANS



POLRI BENTUK SATGAS PREVENTIF

Kasatgas Humas Operasi Tribrata Jaya 2023 Brigjen Ahmad Ramadhan dan jajaran saat meninjau kesiapan pengamanan penyelenggaraan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN ke-43 di Jakarta, Selasa (5/9). Polri menggelar Operasi Tribrata Jaya 2023 dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang digelar di Jakarta, 5-7 September 2023. Dalam pengamanan ini, Polri membagi beberapa satgas salah satunya Satgas Preventif.

SSDM Polri Luncurkan Hotline 'Lapor Bang' Sebagai Implementasi Prinsip BETAH

Jadwal pelaksanaan seleksi Dikbangpimti tahun ini dimajukan, mengingat Indonesia akan menghadapi rangkaian tahapan pemilu 2024.

JAKARTA (IM) - Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri meluncurkan hotline 'Lapor Bang'. Hotline ini diperuntukan bagi personel Polri yang hendak dan sedang mengikuti pendidikan pengembangan (dikbang).

"Tujuannya memberikan kemudahan bagi personel Polri, serta menerapkan prinsip BETAH (bersih, transparan, akuntabel dan humanis) pada tahapan seleksi dikbang,"

kata Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Dedi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Senin (4/9).

Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan para personel dapat berkomunikasi dengan pihaknya untuk bertanya, mengadu dan melapor hingga bertukar informasi seputar kegiatan dikbang.

"Sebagai sarana komunikasi digital baik dalam bentuk WhatsApp, medsos Face-

book, Instagram, X. Jadi setiap proses pembinaan karier di Polri harus sesuai aturan, harus semakin transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan" jelas Dedi.

Personel Polri dapat menghubungi hotline di nomor WhatsApp 082210582753.

"Kami jamin privasi anda," imbuh Dedi.

Selain meluncurkan hotline 'Lapor Bang', Dedi menerangkan dirinya juga melaksanakan pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas seleksi Program Pendidikan (Prodik) Sespimti Polri ke-33, PPRA LXVI dan LXVII Lemhanas

RI serta PKN Tingkat I LAN RI Tahun Anggaran 2024 di Gedung Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri.

"Pelaksanaan seleksi Dikbangpimti tahun ini dimajukan jadwal pelaksanaannya, lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya, mengingat kita akan menghadapi rangkaian tahapan pemilu 2024 yang sangat padat di penghujung tahun," ucap mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini.

Mengingat tugas Polri menjaga keamanan dan ketertiban di tahun politik, sambung Dedi, panitia seleksi Dikbangpimti akan memberikan kebijakan dan fleksibilitas kepada peserta, apabila terjadi hal-hal kontijensi yang menuntut kehadiran para

peserta agar tidak mengganggu dinamika kamtibmas dan operasional kepolisian yang dilaksanakan jelang diselenggarakannya Pemilu 2024," tutur Dedi.

Dedi menambahkan, ada perbedaan antara seleksi dikbangpimti tahun ini dengan tahun sebelumnya, di mana Tes Potensi Akademik (TPA) diganti menjadi Tes Potensi Manajerial Kepemimpinan (TPMK).

"Seluruh panitia yang terlibat agar mewujudkan seleksi yang BETAH, dengan pelibatan pengawasan internal dan eksternal untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan penyimpangan oleh panitia maupun peserta seleksi," pungkas Dedi. • lus

Dua Warga Bengkulu Timbun BBM 30 Ribu Ton Gunakan 30 QR Code

BENGKULU (IM) - Dua warga Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, berinisial BI (43) dan MA (27) ditangkap karena ketahuan menimbun Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia tertangkap basah ketika mengangkut ribuan ton Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite.

Kedua tersangka diringkus di salah satu gudang di daerah tersebut.

Pengungkapan dugaan tindak pidana BBM ilegal ini bermula dari informasi masyarakat, jika di Desa Gunung Agung, kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, digunakan untuk menimbun BBM.

Kedua terduga tersebut berbagi peran. Terduga sebagai BI menyiapkan uang sebagai modal usaha dan mengangkut BBM menggunakan mobil Mitsubishi Kuda warna Biru, bernopol BD 1186DE dan mobil jenis dump truk warna Hijau bernopol BD 8285 Y. Sementara terduga pelaku MA bertugas mengangkut

dan niaga BBM.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsub), Polda Bengkulu, Kombes Pol, I Wayan Riko Setiawan mengatakan, dal menjalankannya aksinya, kedua terduga pelaku secara bergantian mengisi beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan menggunakan sebanyak 30 QR Code dengan berbagai nopol.

"BBM ilegal ini dijual kembali kepada konsumen dengan harga non subsidi dan dilengkapi dengan dokumen perusahaan yang saat ini masih dalam pengembangan penyidikan," kata Wayan, Selasa (5/9).

"Keuntungannya dibagi dua. Terduga pelaku BI mendapatkan 40 persen selaku pemilik modal dan tersangka MA mendapatkan 60 persen," sambung Wayan.

Dalam keterangannya terduga pelaku dihadapan penyidik, aksi tersebut telah dilakoni sejak beberapa

bulan terakhir dengan memanfaatkan pasokan BBM jenis Bio Solar dan Pertalite di SPBU.

Di mana dalam kurun waktu itu, mereka berhasil menjual tak kurang dari 30-an ribu ton, dengan harga Rp8.000 hingga Rp8.200 per liter.

"BBM ini mereka tampung dalam wadah penampungan jenis toren. Jika sudah mencapai 5 ton baru diangkut menggunakan tangki angkut BBM milik perusahaan, ini kita masih dalam," kata Wayan.

Kedua terduga pelaku, terang Wayan, dikenakan Pasal 55 UU No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

"Terduga pelaku disangkakan atas tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Keduanya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp60 miliar," pungkas Wayan. • lus



SIMULASI TANGGAP DARURAT KEBAKARAN DI BOYOLALI

Sejumlah peserta memadamkan api dengan cara manual saat mengikuti simulasi pemadaman kebakaran lahan atau hutan di Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (5/9). Kegiatan yang diikuti petugas gabungan tersebut bertujuan untuk mengedukasi warga serta meningkatkan kewaspadaan kebakaran lahan perkebunan, hutan dan rumah saat musim kemarau.



UJI EMISI KENDARAAN DI JAKARTA BARAT

Unit Kamsel Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat bersama dengan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan uji emisi kendaraan di Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (5/9).

Polri Minta Tambahan Anggaran Rp12 Triliun untuk Kawal Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Mabas Polri meminta tambahan anggaran untuk tahun 2024. Sebelumnya, Polri sudah mendapat pagu anggaran Rp 114,8 triliun. Namun menurut Wakapolri, Komjen Agus Andrianto, anggaran Rp 114 triliun tersebut belum mencukupi.

Agus mengatakan diperlukan ada tambahan anggaran Rp 12,14 triliun untuk sejumlah tugas, salah satunya menjaga keamanan dan kestabilan Pemilu 2024.

"Jumlah pagu anggaran tersebut belum mencukupi," ujar Agus dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

"Polri telah mengusulkan kebutuhan anggaran tambahan dalam penetapan pagu alokasi anggaran Polri 2024 sebesar Rp 12,14 triliun kepada Kemenkeu dan Kementrian PPN atau Bappenas RI," katanya.

Agus pun memaparkan usulan penambahan anggaran sebesar Rp 12,14 triliun tersebut. Dia menyebut Rp

4,5 triliun untuk gaji pegawai baru lulusan tahun 2023, serta pembiayaan tunjangan kinerja 80 persen.

Lalu, sebesar Rp 7,5 triliun digunakan untuk meningkatkan operasional kepolisian dan pelayanan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama dalam menghadapi Pemilu 2024.

Selain itu, kata Agus, pelaksanaan Pemilu 2024 serentak dengan skenario dua putaran dan dilanjutkan dengan Pilkada 2024 disebut bisa menimbulkan penambahan anggaran.

Kemudian, kenaikan harga BBM dan bertambahnya alat transportasi, peningkatan kebutuhan internet dan peralatan elektronik, munculnya daerah otonomi baru. Sementara itu, penambahan anggaran juga diperlukan dalam pembentukan polda, polres, dan satker baru, hingga jika terjadi peningkatan kasus tindak pidana. "Serta kenaikan intensitas aksi terorisme atau radikalisme yang berakibat terhadap gangguan kamtibmas,"kata Agus. • lus